

BELANJA DAERAH - ANGGARAN - PENDAPATAN - PERTANGGUNGJAWABAN

2022

PERDAPROV. NTT NO.7, LD 2022/NO.007. TLD NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Abstrak : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU. NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampirkan laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah mendapat persetujuan bersama DPRD, telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-5250 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi NTT tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021. Dengan dilakukannya penyempurnaan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No.21 Tahun 2022, PP No. 8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan PERDAPROV. No.2 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan per 31 Desember 2021 yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan cacatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2021.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2022
- Penjelasan : 349 hlm